

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	SUTASOMA (SISTEM PERLINDUNGAN PETANI SOPPENG MAJU DAN SEJAHTERA)	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KABUPATEN SOPPENG		
Nama Inovator	ariyadin arif		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melayani dan melindungi para pekerja dari resiko kecelakaan kerja melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 2004. Adanya penguatan regulasi tersebut diatas belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah sehingga beberapa kasus kecelakaan pekerja harus menjadi beban keluarga sehingga menjadi salah satu indikator munculnya kemiskinan baru bagi masyarakat khususnya petani. Berdasarkan data BPS dan data BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 terdapat jumlah tenaga kerja petani sebanyak 55,289 orang sedangkan yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan belum ada. Menyikapi permasalahan tersebut diatas, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng melalui Inovasi "SUTASOMA" (Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera) yang selaras dengan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan melalui Role Model Perjanjian Kerjasama, Penguatan Regulasi dan Intervensi Kontrol Kebijakan bersifat Kolaboratif, Terintegrasi dan Sistematis, berbasis digital dengan server BPJS Ketenagakerjaan tanpa Pendanaan APBD dengan melibatkan penyuluh, kepala desa/lurah, camat, SKPD Teknis dan unsur forkopimda. Adapun hasil pencapaian Sutasoma untuk posisi Bulan Desember 2022 sebanyak 10.750 petani aktif dengan jumlah klaim kasus sebanyak 104 kasus atau setara Rp. 2.433.000.000,- yang berdampak pada antusias kemauan dan kemampuan petani pada inovasi ini.

Link <https://drive.google.com/drive/folders/1OI0y1afHBroip6pnrWhKp8ciYuYRZfmY?usp=sharing>

2. Ide Inovatif

Dinamika dan kompleksitas resiko kecelakaan kerja pada setiap jenjang profesi menimbulkan permasalahan, tantangan, dan peluang yang terus berkembang tanpa adanya dukungan jaminan kecelakaan maupun jaminan kematian. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kab. Soppeng Tahun 2020 menunjukkan jumlah kasus kecelakaan kerja yang mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian di Kabupaten Soppeng sebanyak 24 kasus atau setara dengan Rp. 954.000.000,-. bagi pekerja penerima upah sedangkan petani yang sangat rentan terhadap kasus kecelakaan kerja belum ada yang mendapatkan jaminan kecelakaan maupun kematian. Beberapa faktor penyebab permasalahan tersebut diatas adalah masih rendahnya pengetahuan petani tentang perlindungan program Jamsostek, rantai administrasi pengurusan dan akses pendaftaran dan pembayaran Jamsostek yang panjang serta belum ada sistem yang terintegrasi memudahkan pelayanan Jamsostek. Menindaklanjuti fenomena tersebut diatas, melalui sharing diskusi yang dinisiasi bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab. Soppeng, Para Kepala Bidang dan Koordinator Penyuluh lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng menghasilkan sebuah Kolaborasi Inovasi "SUTASOMA" (Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng (link terlampir) Adapun beberapa faktor yang menjadi latar belakang sehingga munculnya gagasan tersebut sebagai berikut : a. petani sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng belum

memiliki perlindungan jamsostek. b. petani mengalami kecelakaan kerja dimana faktor biaya pengobatan perawatan yang layak sampai sembuh menjadi kendala utama ditambah ketidakpahaman petani terhadap administrasi Rumah Sakit atau Puskesmas. c. belum ada uang duka yang dapat meringankan beban hidup ahli waris yang ditinggalkan jika petani meninggal dunia. d. adanya potensi anak petani putus sekolah jika petani mengalami kecelakaan kerja dan/atau meninggal dunia. e. sulitnya petani mendapatkan informasi manfaat program jamsostek. f. sulitnya petani mendaftar dan membayar iuran program jamsostek. g. petani atau ahli warisnya merasa sulit untuk mendapatkan manfaat program jamsostek jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Berdasarkan inisiasi tersebut, maka SUTASOMA dirancang untuk membangun pondasi kesadaran dan perubahan pola pikir petani agar mampu melindungi dirinya dari kecelakaan kerja secara berkelanjutan tanpa ada ketergantungan dengan anggaran pemerintah. Adapun tujuan inovasi ini adalah untuk Mewujudkan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terintegrasi Berbasis Digital menuju Kemandirian Lokal Petani. Sedangkan nilai kebaruan atau nilai tambah Inovasi ini adalah : a. pelayanan jemput bola (jempol) berbasis digital terintegrasi dengan Sistem BPJS Ketenagakerjaan dan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) kepada petani mulai dari proses pendaftaran, pembayaran iuran hingga kepastian mendapatkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan (aplikasi host to host) b. pembayaran kepesertaan secara mandiri (tanpa dukungan APBD) c. intervensi kebijakan pemerintah terhadap bantuan dan barang bersubsidi yang digunakan petani melalui Surat Edaran Bupati (link terlampir) d. Simbiosis Mutualisme antara Penyuluh sebagai agen Sutasoma dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dimana para penyuluh mendapatkan fee atau insentif pendaftaran dan iuran dalam setiap bulan (diatur dalam PKS) Adanya beberapa keunikan tersebut membuat petani lebih mudah dan terlayani untuk mengakses perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara inklusif dan berkeadilan

Link <https://drive.google.com/drive/folders/1mFdvhvQDSMC2KezN9IuZyoEnyNy69aJSE?usp=sharing>

3. Signifikansi

Sutasoma merupakan sebuah bentuk role model kolaborasi yang pertama di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia yang dibangun secara Terintegrasi dan Sistematis berbasis digital host to host dengan Server BPJS Ketenagakerjaan tanpa dukungan pendanaan APBD Kabupaten yang di Launching oleh Menteri Pertanian RI bapak Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 29 Desember 2021 guna melayani petani dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan apabila mengalami kecelakaan kerja atau kematian yang berdampak pada sustainabilitas atau peningkatan daya beli masyarakat sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Bentuk Kolaborasi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Kabupaten Soppeng. Dalam PKS tersebut diatur tentang cara pelaksanaan SUTASOMA, Hak dan Kewajiban kedua belah pihak serta sistem pembayaran/jumlah iuran/batas waktu pembayaran iuran melalui sistem yang terintegrasi. Sedangkan untuk memudahkan pelaksanaan inovasi ini, maka disusun sebuah buku panduan teknis yang wajib dipegang oleh penyuluh sebagai agen SUTASOMA (link PKS dan buku pedoman terlampir) Sebelum tataran implementasi inovasi ini, maka terlebih dahulu dilakukan sosialisasi di 8 Balai Penyuluhan Pertanian dengan mengundang perwakilan 892 kelompok tani yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pola kerja dan manfaat inovasi ini sehingga memudahkan penyuluh apabila melakukan kunjungan ke rumah petani. Setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut, petani dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran melalui Petugas Penyuluh Lapangan sebesar Rp. 16.800,-/bulan bersama fotocoy KTP yang akan berkunjung ke rumah masing-masing petani. PPL menggunakan smartphonanya yang telah terintegrasi secara host to host dengan server BPJS Ketenagakerjaan. Petani tidak perlu memikirkan biaya pengobatan dan administrasi Rumah Sakit atau Puskesmas, karena telah terintegrasi secara otomatis apabila terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Untuk memperoleh informasi, data dan hasil serta dampak pelaksanaan inovasi SUTASOMA tersebut, maka dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap tanggal 5 bulan berjalan dimana tempat pelaksanaannya di gilir di 8 Balai Penyuluhan Kecamatan. Pada kesempatan

tersebut hadir Wakil Bupati Soppeng, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala DTPHPKP Kab. Soppeng, Koordinator BPP 8 Kecamatan dan Penyuluh sebagai Agen Sutasoma. Rapat monev tersebut dipaparkan progres target pencapaian dan strategi pelaksanaan inovasi per 8 Kecamatan (Marioriwawo, Liliriaja, Lilirilau, Lalabata, Donri-Donri, Marioriaawa, Ganra, Citta) serta solusi pemecahan masalah. Disamping itu untuk lebih memberikan motivasi kerja kepada para Koordinator BPP dan Penyuluh dalam mencapai target, maka diberikan reward/penghargaan bagi BPP Kecamatan yang tertinggi pencapaian SUTASOMA berupa uang pembinaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2020 belum ada petani yang terlindungi program Jamsostek. Ketika inovasi SUTASOMA mulai diperkenalkan pada tahun 2021, petani yang mendapatkan perlindungan program jamsostek meningkat menjadi 4.334 orang dan terdapat 2 kasus meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dengan total santunan sebesar Rp 84 juta. Perlindungan program jamsostek meningkat menjadi 10.750 orang pada tahun 2022 dan terdapat 50 kasus kecelakaan kerja dengan total JKK sebesar Rp 165 juta serta 54 kasus meninggal bukan akibat kecelakaan kerja dengan total JKM sebesar 2,268 Milyar. Mercermati data diatas menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang mendasar sebelum dan sesudah Inovasi SUTASOMA ini di implementasikan yang secara garis besar sebagai berikut : - Peningkatan kepesertaan perlindungan Jamsostek bagi petani dari 0 menjadi 10.750 petani aktif - Pembayaran JKK dan JKM bagi petani dari 0 rupiah menjadi Rp.2.433.000.000,- Terjadinya peningkatan kepesertaan Jamsostek bagi petani sangat berimplikasi pada pemahaman dan kemandirian petani terhadap manfaat jamsostek yang berdampak pada kemauan dan kemampuan untuk merasa memiliki terhadap inovasi ini. Adapun penilaian/assment terhadap keberhasilan sebelum dan sesudah inovasi SUTASOMA dirumuskan kedalam tiga indikator yaitu : 1. Cakupan perlindungan yaitu peningkatan prosentase jumlah petani yang menjadi peserta Jamsostek 2. Pelayanan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani dalam mendapatkan manfaat program diproses dengan jumlah klaim dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kasus atau resiko 3. Keberlanjutan perlindungan yang diproses dengan pembayaran iuran lanjutan.

Link <https://drive.google.com/drive/folders/13Z7Yy5m0TNStTJZfyNwCn7yB6BQiCPKP?usp=sharing>

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Inovasi SUTASOMA merupakan salah satu instrumen Pemerintah Daerah yang berkontribusi nyata untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dimana manfaat Jaminan Kecelakaan dan Kematian seperti pengobatan perawatan sampai sembuh tanpa batasan biaya dengan standar kelas I rumah sakit pemerintah, jaminan kematian sebesar Rp. 42 juta dan Beasiswa bagi anak yang ditinggalkan sampai perguruan tinggi sehingga dapat mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan atau mencegah terjadinya kemiskinan baru bagi petani penggarap. Kontribusi inovasi tersebut diatas selaras dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 : Tanpa Kemiskinan pada Point 4 : Pada Tahun 2030 memastikan semua penduduk terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi (seperti hak layanan dasar, kepemilikan dan akses pada lahan) serta memastikan mereka memperoleh akses teknologi, jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kab. Soppeng Tahun 2020 sampai Tahun 2022, terjadi peningkatan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dari nol menjadi 50 kasus klaim atau setara Rp. 165 juta serta Jaminan Kematian Kerja dari 0 menjadi 54 kasus klaim atau setara Rp. 2,268 Milyar . Hal ini menandakan bahwa secara makroekonomi, multiplier effect tersebut dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar (velocity of money) di tingkat petani sehingga secara makro ekonomi berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB

Link <https://drive.google.com/drive/folders/1lZUjiW2X3gIFx69FkQS9-gDzBIDOLITF?usp=sharing>

5. Adaptabilitas

Selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun tataran pelaksanaan inovasi SUTASOMA yang dilaksanakan di 892 kelompok tani yang tersebar di 70 desa/kelurahan mengalami berbagai macam tantangan utamanya pada saat masa Pandemi Covid 19 dimana masyarakat dilarang untuk

berkumpul dan berinteraksi serta terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Penyuluh sebagai agen Sutasoma sangat kesulitan untuk melakukan pendaftaran di rumah petani akibat ketatnya aturan dari pemerintah setempat. Menyikapi hal tersebut beberapa strategi adaptif diterapkan untuk menghasilkan sebuah formulasi kerja yang efektif dan efisien tanpa melanggar aturan protokol kesehatan sebagai berikut : a. Petani cukup mengirimkan fotocopy KTP dan informasi kasus kecelakaan dan kematian lewat jaringan group media sosial yang dibangun oleh penyuluh untuk mendapatkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan b. Mengaktifkan pembayaran pendaftaran dan iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan di Agen Brilink, Agen BNI 46 dan Agen Mandiri terdekat di 70 desa/kelurahan c. Mengaktifkan pembayaran lewat pasar modern (alfamart, alfamidi, indomart) serta lewat pembayaran digital (Linkaja, Ovo) Untuk lebih memperluas informasi tentang SUTASOMA, beberapa wartawan, LSM dan penggiat media sosial digandeng untuk membuat pemberitaan terkait inovasi ini baik Media Lokal maupun Nasional sehingga jangkauan informasi dapat diketahui oleh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Alhasil beberapa kabupaten/kota bahkan Kementerian Pertanian telah merespons inovasi ini dan melakukan hubungan komunikasi baik secara online (telpon, WA) dan melakukan kunjungan di Kabupaten Soppeng guna menggali lebih dalam terkait inovasi SUTASOMA. Mereka sangat tertarik dengan strategi pelaksanaan inovasi tanpa dukungan APBD dan lebih menonjolkan kemandirian dan intervensi kebijakan berbasis kearifan lokal jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang selalu mengandalkan APBD sehingga program atau inovasi tersebut tidak berkelanjutan karena ditentukan kemampuan APBD setiap tahunnya. Seperti halnya dengan Direktur Pembiayaan Dirjen Sarana Prasarana Kementerian Pertanian melakukan pertemuan silaturahmi untuk mengetahui secara detail bentuk alur kerja dan intervensi kebijakan daerah terhadap barang subsidi (pupuk) untuk petani sehingga bisa diadopsi dan direplikasi di Kementerian Pertanian RI. Begitupun dengan kunjungan kerja Kadis Pertanian Kabupaten Bojonegoro bersama jajarannya, Kabupaten Wajo, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Pasuruan dan Kota Palopo.

Link <https://drive.google.com/drive/folders/1tqExleZLX9aE7MfK7qE9mezYNG0Vwvhf?usp=sharing>

6. Keberlanjutan

Faktor sustainable merupakan tolok ukur penentu dan keberhasilan sebuah inovasi yang didukung oleh pengelolaan manajemen dan sumber daya yang terintegrasi dan sistematis. Begitupun SUTASOMA dimana telah menjadi sebuah kebutuhan dan kewajiban petani. Ada beberapa strategi pendukung sehingga inovasi tetap berjalan secara berkelanjutan : a. Rasa memiliki yang cukup tinggi dari petani mengingat inovasi ini dibangun melalui proses perubahan pola pikir yang cukup panjang sehingga timbul kesadaran dan kemauan sendiri dari petani b. Pelayanan yang mudah berbasis digital/aplikasi dimana petani tinggal menunggu kartu dan layanan administrasi di rumah tanpa harus antri atau keluar rumah c. Pembayaran iuran yang mudah dimana petani dapat menitip di penyuluh, dapat membayar langsung dengan mendatangi agen brilink, pasar modern ataupun dibayar secara digital di rumah melalui aplikasi. d. Proses pengurusan klaim kasus kematian yang sangat mudah dan singkat dimana petani hanya cukup melaporkan kepada penyuluh apabila terjadi kasus kecelakaan dan kematian selanjutnya penyuluh meneruskan kepada BPJS e. Penyerahan santunan jaminan kematian diserahkan Wakil Bupati dan Forkopimda sehingga petani melihat langsung dukungan penuh pemerintah daerah f. identifikasi kejadiankecelakaan dan kematian dalam waktu kurang lebih 1 minggu, klaim pembayaran sudah dapat diterima ahli warisnya. e. Fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas) yang sudah terintegrasi apabila petani mengalami kecelakaan kerja tanpa harus mengurus administrasi lainnya. f. Tanpa dukungan APBD sehingga inovasi ini berjalan dan mengalir permanen tanpa harus menunggu alokasi anggaran jika dibandingkan dengan daerah lain yang menggunakan APBD sebagai tumpuan harapan apabila alokasi anggaran mengalami defisit maka inovasi tersebut berhenti atau stagnan. Hal tersebut yang membedakan SUTASOMA sehingga kemandirian petani dapat terbangun secara berkelanjutan. Menindaklanjuti beberapa masukan dari tim SUTASOMA untuk lebih meningkatkan target dan menguatkan keberlanjutan inovasi ini, maka dilakukan sebuah langkah strategi intervensi kebijakan melalui

penyusunan regulasi draft peraturan bupati tentang Sistem Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Pertanian dimana dilakukan sinkronisasi pembayaran E-Kartu Tani dengan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga petani secara otomatis dapat menebus pupuk sekaligus melakukan pembayaran iuran satu kali gesek secara by sistem. Langkah ini sangat efektif mengingat ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi sangat tinggi sehingga pendaftaran dan pembayaran iuran menjadi salah satu persyaratan wajib untuk menebus pupuk bersubsidi (link draft perbup terlampir) Adapun faktor peluang keberlanjutan Inovasi Sutasoma sebagai berikut : a. kesadaran petani dalam perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan iuran yang terjangkau yaitu sebesar Rp 16.800 per bulan per petani. b. kepastian petani atau ahli waris mendapatkan manfaat program jamsostek dapat menanggulangi kemiskinan ekstrem yang diakibatkan kasus kecelakaan kerja dan/atau meninggal dunia. c. pemerintah daerah memiliki data perlindungan program jamsostek dan jumlah kasus kecelakaan kerja dan meninggal dunia bagi petani. d. secara makro ekonomi berdampak kepada sustainabilitas atau peningkatan daya beli masyarakat yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah

Link <https://drive.google.com/drive/folders/1vmI1dl8MJvW1iPJYxlkDUpVm-esfxoer?usp=sharing>

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan inovasi SUTASOMA melibatkan kolaborasi beberapa stakeholder pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang diatur dalam Keputusan Bupati Soppeng dan Peraturan Bupati Soppeng (link terlampir) sebagai berikut : a) Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Soppeng, yang berperan dalam memberikan dukungan kebijakan baik secara moril maupun materil berupa regulasi surat edaran dan peraturan bupati. b) BPJS Ketenagakerjaan berperan memastikan alur proses SUTASOMA mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim berjalan lancar. c) Forkopimda Kabupaten Soppeng (Kejaksaan Negeri, Kapolres dan Dandim beserta Babinsa dan Babinkamtibmas) berperan melakukan pengawalan regulasi dan pendampingan hukum apabila terdapat kasus atau laporan terkait inovasi SUTASOMA . d) Dinas PMPTSP-NAKERTRANS Kabupaten Soppeng sebagai OPD yang memberikan dukungan bantuan sosialisasi terkait perlindungan program Jamsostek. e) Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng melalui Koordinator BPP Kecamatan dan Penyuluh berperan sebagai Agen Sutasoma bekerja sebagai pemain inti dalam melakukan inovasi ini. f) Perangkat Kecamatan (Camat beserta jajaran) berperan membantu percepatan administrasi dan klaim manfaat program jamsostek di wilayah sesuai kewenangannya. g) Perangkat Desa/Lurah (Kades/Lurah beserta jajaran) berperan membantu percepatan administrasi dan klaim manfaat program jamsostek di wilayah sesuai kewenangannya h) Rumah Sakit/Puskesmas berperan sebagai penyedia layanan kesehatan.

Link https://drive.google.com/drive/folders/19_Udtx61KO9r0sA2JbvphA-khJKNuicn?usp=sharing